

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
KEBERMANFAATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Tegal)**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh :

Janatin Fitriyani

1505046006

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Janatin Fitriyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr, wb

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Janatin Fitriyani

NIM : 1505046006

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok
Wajib Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi
Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tegal)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, Oktober 2019

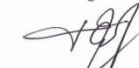
Pembimbing I



Dr. M. Nur Fatoni, M.Ag

NIP.19730811 200003 1 004

Pembimbing II



Arif Afendi, SE, M.Sc

NIP.19850526 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Janatin Fitriyani
NIM : 1505046006
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok
Wajib Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi
Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tegal)

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri
Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Baik, pada tanggal :

18 Oktober 2019

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu
akuntansi syariah tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 21 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

Sekretaris Sidang,

Drs. Sackhu, M.H.
NIP. 196901201994031004



Penguji I,

Rahman El-Junusi, S.E., M.M.
NIP. 196911182000031001

Penguji II,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing I,

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Pembimbing II,

Arif Efendi, S.E., M.Sc.
NIP. 198505262015031002

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Janatin Fitriyani

NIM : 1505046006

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan NPWP dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan dalam pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 Oktober 2019


Janatin Fitriyani

NIM. 1505046006

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى

الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri diantara kamu”*

(Surah An-Nisa- Ayat 59)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta kesempatan dan keridhoanNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam juga saya sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliau sumber dari segala ilmu pengetahuan. Dengan terselesaikannya tulisan skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Sodikun (Alm) orang tua tercinta yang telah meninggal sejak tahun 2010 ketika saya masih menempuh pendidikan SMP Kelas VII, terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti hingga saat ini. Semoga beliau bangga dengan perjuanganku dan bahagia di alam sana. Dan untuk ibu Samiroh tercinta yang selalu mendoakanku, mendidikku sampai sekarang ini, dan selalu membimbingku.
2. Keluarga besarku yang selalu mendoakanku dan selalu memberi dukungan.
3. Keluarga besar Ikatan Alumni MAN 1 Brebes (IKAMANSABES), baik anggota, pengurus senior maupun alumni.
4. Anak-anak kos B1 Perumahan Bank Niaga lantai 2, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Sahabat terkasihku (Ukhti, Neneng, Richo, Yuka, Samroh, halim) yang memberikanku semangat dan selalu mendoakan yang terbaik untukku.
6. Teman-teman seperjuangan AKS 15, yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang tulus dan tidak ternilai harganya.
7. Teman hidup selama 45 hari (KKN Posko 55), yang telah memberikan semangat dan memberikan banyak pengalaman.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--- [◌] ---	Fathah	A	A
--- _◌ ---	Kasrah	I	I
--- [◌] ---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-- [◌] --ي	fathah dan ya`	ai	a-i
-- [◌] —و	fathah dan wau	au	a-u

kataba	كَتَبَ	- yāzhabu	يَذْهَبُ
fa'ala	فَعَلَ	- su'ila	سُئِلَ
zūkira	ذُكِرَ	- kaifa	كَيْفَ
			- haula هَوَلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -	raudah al-aṭfāl
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -	raudatul aṭfāl
المدينة المنورة -	al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	-Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرِّ	-	al-birr
الْحَجِّ	-	al-hajj

نعم

-

na''ama

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُل

-

ar-rajulu

السَّيِّدَة

-

as-sayyidatu

الشَّمْس

-

asy-syamsu

القَلَم

-

al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون	-	ta'khuzūna
النوء	-	an-nau'
شيئ	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ	Fa aufu al-kaila wal mīzāna
	Fa auful kaila wal mīzāna
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-khalīl
	Ibrāhīmul khalīl
بِسْمِ اللَّهِ جَعْرِهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrēhā wa mursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan nāsi hijju al-baiti
Manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun
illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ

Inna awwala baitin
wuḍ’a linnāsi lallaẓī bi
Bakkata mubārakatan

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍāna al-
laẓī unzila fihi al-
Qur’ānu, atau
Syahru Ramaḍāna al-
laẓī unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُقْيَمِ

Wa laqad ra’āhu bi al-
ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alḥamdu lillāhi rabbi al-
‘ālamīna, atau

Alḥamdu lillāhi rabbil
‘ālamīna

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an
	Lillāhil amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2) Pengaruh Kebermanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (3) Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Objek penelitian ini menggunakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner, kuesioner diuji menggunakan aplikasi SPSS teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,683 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} ($6,667 > 1,984$) pada signifikansi $0,000 < 5\%$. Kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,324 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} ($3,247 > 1,984$) pada signifikansi $0,002 < 5\%$. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,243 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} ($2,686 > 1,984$) pada signifikansi $0,009 < 5\%$. Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan NPWP, dan Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : *Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan NPWP, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segalalimpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Jenjang Strata 1 (S-1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si., Akt., CA., CPAI., selaku Ketua

Jurusan Akuntansi Syariah dan Warno, S.E.,M.Si. selaku sekretaris jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. H. Muchammad Fauzi, S.E., MM. selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi.
5. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku pembimbing I yang senantiasa selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Arif Afendi,SE.,M.Sc. selaku pembimbing II yang senantiasa selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongoyang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Budi Gunawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan AKS A yang telah menemani sejak awal perkuliahan sampai saat ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan akuntansi syariah yang telah memberikan motivasi dan pengalaman berharga.

Semoga semua amal baik mereka dicatat oleh Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung didalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GRAFIK	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	13
2.1.1.1.. Teori Asuransi.....	13

2.1.1.2.. Teori Kepentingan.....	13
2.1.1.3.. Teori Bakti	13
2.1.1.4.. Teori Asas Daya Beli	13
2.1.1.5.. Teori Daya Pikul	14
2.1.1.6.. Pengertian Pajak.....	14
2.1.1.7.. Peranan Pajak.....	16
2.1.1.8.. Hukum Pajak.....	17
2.1.1.9.. Jenis-jenis Pajak.....	18
2.1.1.10.Subjek Pajak.....	19
2.1.1.11.Objek Pajak.....	22
2.1.1.12.Tata Cara Pemungutan Pajak	24
2.1.1.13.Asas Pemungutan Pajak	26
2.1.1.14.Sistem Pemungutan Pajak	26
2.1.1.15.Tarif Pajak.....	28
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.2.2. Kepatuhan Dalam Islam.....	35
2.3. Kesadaran Wajib Pajak.....	34
2.4. Kebermanfaatan NPWP.....	36
2.4.1. Pengertian NPWP	36
2.4.2. Kemanfaatan NPWP	36
2.4.3. Fungsi NPWP	37
2.4.4. Pendaftaran NPWP	38
2.5. Religiusitas	39
2.6. Pajak Dalam Perspektif Islam.....	41
2.6.1. Pengertian Pajak Menurut Islam	41
2.6.2. Jenis Pajak Dalam Sistem Perpajakan Menurut	

Islam	42
2.6.3. Bagaimana Pajak Dikenakan Dalam Islam.....	43
2.7. Penelitian Terdahulu.....	45
2.8. Kerangka Pemikiran	49
2.9. Hipotesis Penelitian	51
2.9.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak	51
2.9.2. Pengaruh Kebermanfaatan NPWP	51
2.9.3. Pengaruh Religiusitas	52

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data	53
3.1.1. Jenis Penelitian	53
3.1.2. Sumber Data	53
3.2. Populasi dan Sampel.....	54
3.3. Metode Pengumpulan Data	56
3.4. Variabel Penelitian	56
3.4.1. Variabel Independen	56
3.4.2. Variabel Dependen	56
3.5. Definisi Operasional	57
3.5.1. Instrument Penelitian	60
3.6. Analisis Data	61
3.6.1. Statistik Deskriptif	61
3.6.2. Uji Instrumen	62
3.6.2.1. Uji Reliabilitas.....	62
3.6.2.2. Uji Validitas	62
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	62
3.6.3.1. Uji Normalitas	62
3.6.3.2. Uji Hereroskedastisitas	62

3.6.3.3. Uji Multikolonieritas	62
3.6.4. Pengujian Hipotesis	65
3.6.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda ..	65
3.6.4.2. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	65
3.6.4.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)....	66
3.6.4.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	66

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian di KPP Pratama Tegal	67
4.2. Deskripsi Responden	68
4.3. Analisis Statistik Deskriptif.....	71
4.4. Uji Reliabilitas Dan Validitas	72
4.4.1. Uji Reliabilitas.....	72
4.4.2. Uji Validitas.....	73
4.5. Uji Asumsi Klasik	76
4.5.1. Uji Normalitas	76
4.5.2. Uji Heteroskedastisitas	80
4.5.3. Uji Multikolineritas	82
4.6. Uji Regresi Linear Berganda	84
4.7. Uji Hipotesis.....	86
4.7.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	87
4.7.2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)	87
4.7.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	89
4.8. Pembahasan Hasil Penelitian.....	91
4.8.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak.....	91
4.8.2. Pengaruh Kebermanfaatan NPWP	92
4.8.3. Pengaruh Religiusitas	94

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan	96
5.2. Keterbatasan Penelitian	97
5.3. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	3
Tabel 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	4
Tabel 2.1 Tarif Progresif	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	57
Tabel 3.2 Skala Likert	61
Tabel 4.1 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4.2 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Umur	69
Tabel 4.3 Deskripsi Data Responden Pendidikan Terakhir.....	69
Tabel 4.4 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	70
Tabel 4.5 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Punya Atau Belum Punya NPWP	70
Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif	71
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas.....	73
Tabel 4.8 Uji Validitas	75
Tabel 4.9 Uji Kolmogorov-Smirnov	79
Tabel 4.10 Uji Glejser	81
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas	82
Tabel 4.12 Uji Regresi Linear Berganda.....	84
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	87
Tabel 4.14 Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	88
Tabel 4.15 Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik Histogram	77
Grafik 4.2 Normal Probability Plot	78
Garfik 4.3 Grafik Scatterplot.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritik

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Jawaban Responden terhadap masing masing pernyataan
Lampiran 3	Statistik Deskriptif
Lampiran 4	Deskripsi Responden
Lampiran 5	Uji Reliabilitas Dan Uji Validitas
Lampiran 6	Uji Asumsi Klasik
Lampiran 7	Uji Regresi Linear Berganda
Lampiran 8	Pengujian Hipotesis...
Lampiran 9	Surat Jawaban Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal
Lampiran 10	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak memang bukan satu satunya sumber dana negara melainkan sumber yang sangat dominan untuk pemasukan negara diseluruh dunia. Sebagian besar penerimaan negara yang tertutang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan pemerintah untuk kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang tentunya dengan sumber pembiayaan yang memadai. Peranan pajak dalam pembangunan sangat dominan pajak dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari hari manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan dan lain lain.

“Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.¹

¹ Mardiasmo “*perpajakan edisi terbaru 2016*” (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016).

Bagi Indonesia pajak mulai hangat dibicarakan dan menjadi perhatian publik sejak pemerintah menyadari bahwa penerimaan negara yang berbasis hasil pengelolaan sumber daya alam terutama migas mengandung risiko yang cukup serius. Risiko yang ada diantaranya jumlah yang semakin menurun dari waktu ke waktu sifatnya tidak dapat tergantikan dan harga dipengaruhi pasar internasional yang sangat fluktuatif. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilaksanakan dan harus dijamin keberlangsungannya. Pada saat inilah reformasi perpajakan pertama di Indonesia dilakukan setidaknya terdapat dua hal mendasar yang menjadi karakter reformasi perpajakan pertama yaitu perubahan paradigma pemungutan dari *official assessment* ke *self assessment* dan penerapan Undang-undang perpajakan.

Penerimaan pajak negara yang optimal DJP memegang peran penting dalam mencapai penerimaan negara yang sudah tercantum dalam APBN maupun APBN-P. pencapaian sasaran tersebut diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) persentase realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan data dashboard penerimaan DJP, yang mencakup seluruh penerimaan pajak baik penerimaan pajak non migas maupun migas diperoleh capaian persentase realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir. Untuk melihat capaian persentase realisasi penerimaan pajak.

Tabel 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2016	2017	2018
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%

Sumber: Data Lakin DJP 2018

Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2018 mencapai Rp. 1.315,51 triliun atau 92,24% dari target tahun APBN-P 2018 sebesar Rp. 1.424,00 triliun. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2017, yaitu sebesar 89,67%. Hal ini tentunya masih berpotensi untuk bisa terus ditingkatkan lagi. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan cara mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dikantor Pelayanan Pajak, karena kesadaran dan kepatuhan perpajakan merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan system tersebut.

Penerimaan pajak didapat dari wajib pajak yang membayar pajak terutangnya lalu mengalir ke kas negara dengan memakai metode atau cara yang disebut sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan metode atau cara mengelola utang pajak yang terutang dari wajib pajak sehingga mengalir ke kas negara. Mengingat begitu

pentingnya peranan pajak, maka pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak salah satunya dengan diberlakukannya *self assessment system*. system pemungutan pajak memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak terutangnya sendiri.²

Kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal 204.950. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan meskipun jumlah pajak yang terdaftar semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal sebagai berikut

Tabel `1.2
Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Kepatuhan Wajib Pajak
2016	54%
2017	69%
2018	63%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratam Tegal masih mengalami naik turun, pada

² Abdul, rahman. “ *panduan pelaksanaan administrasi perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis dan perusahaan*”. Bandung: nuansa.

tahun 2018 dikatakan oleh kepala KPP Pratama Tegal bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih cukup rendah, karena pada tahun tersebut KPP Pratama Tegal targetkan kepatuhan pajak sebesar 70%.

Kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Dari pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak tersebut mengetahui, menaati dan memahami peraturan perpajakan dengan benar namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kewajiban sebagai wajib pajak dan berusaha melakukan upaya penghindaran pajak agar tidak menanggung beban yang besar. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan dengan kesadaran pajak yang tinggi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat sebab wajib pajak yang sadar akan kewajibannya salah satunya ditunjukkan dengan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Namun tidak mudah untuk menggugah kesadaran masyarakat khususnya pengusaha kena pajak untuk taat membayar pajak. Karena banyak sekali kendala dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya dari pengusaha-pengusaha daerah yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak atau pengusaha daerah yang sudah mempunyai NPWP tetapi wajib pajak tidak membayar

kewajiban pajaknya, dikarenakan masyarakat menganggap bahwa pengurusan pembuatan NPWP untuk pengusaha pengusaha ini susah dan berbelit belit, sehingga mereka tidak mau bertemu dengan birokrasi yang terlalu lama menanganinya.

Ketaatan wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak itu sendiri selalu taat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³ Sesuai dengan keputusan dari Menteri Keuangan Nomor: 235/KMK.03/2003, dari surat keputusan Direktur Jenderal Perpajakan N0: KEP-213/PJ/2003, dan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No: SE-13/PJ.331/2003 tentang tata wajib pajak yang taat antara lain daftar wajib pajak, menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Semakin tinggi dampaknya terhadap kenaikan pajak maka pencapaian target penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

Sikap wajib pajak untuk kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak harus percaya terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, dimana wajib pajak tersebut takut melakukan pelanggaran peraturan pajak karena dapat merugikan negara. Dari perilaku tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari religiusitas.

³ Siti kurnia rahayu, "Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung:Rekaya Sains. (2017)

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2009) mengatakan bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Masruroh (2013) mengatakan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴ Dan Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan dari penelitian relevan dengan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.⁵ Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survey

⁴ Masruroh, Siti & Zulaikha. “*Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal)*”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. *Journal Of Accounting*.UNDIP(2013).

⁵ Lady Ayu Anggraeni “ *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (di Kantor Pelayanan Pajak Pratama)*”, Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017.

dengan menggunakan media kuesioner, Perbedaan dari penelitian ini adalah sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang tepat adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Tegal, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan

Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

b. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

c. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4. Sitematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun sistematika pembahasan dalam tiap-tiap bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama ini didasarkan pada

bahasan masih secara umum. Bab ini nantinya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kemanfaatan NPWP, religiusitas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, meliputi : jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Setelah pembahasan yang mendalam pada landasan teori dan data yang telah peneliti peroleh, kemudian peneliti mengolah data yang telah diperolehnya. Yang akan diuraikan dalam bab ini meliputi gambaran umum obyek penelitian dan karakteristik responden, deskripsi data penelitian, uji validitas dan realibilitas instrument, uji asumsi klasik, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok

permasalahan yang penyusun ajukan, keterbatasan penelitian dan juga saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

2.1.1.1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibartkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2.1.1.2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

2.1.1.3. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

2.1.1.4. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali

kemasyarakatan dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.5. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur objektif, dengan memerhatikan kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Misalnya secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.¹

2.1.1.6. Pengertian Pajak

“Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

¹ Mardiasmo “*perpajakan edisi terbaru 2016*” (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 5-6

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa definisi pajak menurut para ahli antara lain”²

Menurut Rochmat Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Pajak memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan perekonomian negara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak adalah sumber penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk membayar seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan.³

Adapun menurut Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁴

² Mardiasmo “*perpajakan edisi terbaru 2016*” (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 3.

³Liberti Pandiangan “ *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*” (Erlangga, 2014), hlm 4.

⁴ Lina Nurlaela, “*Pengaruh Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Garut*”. Jurnal Wahana Akuntansi. 2(2):1 Tahun 2017.

Allah Berfirman pada surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa:29)⁵

Dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

2.1.1.7. Peranan Pajak

Pajak memiliki peranan fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur. Ada dua fungsi pajak yaitu:

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- c. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- d. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.⁶

2.1.1.8. Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungutan pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. ada 2 macam hukum pajak yaitu:

- 1. Hukum pajak materiil, memuat norma norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa

⁶ Mardiasmo “*perpajakan edisi terbaru 2016*” (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 4.

yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan tarif pajak segala sesuatu tentang timbul hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak gak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.1.1.9. Jenis Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain.
2. Menurut sifatnya
- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif yaitu wajib pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya
- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.⁷

2.1.1.10 . Subjek Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

⁷ Mardiasmo “*perpajakan edisi terbaru 2016*” (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 7-8.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak meliputi:

1) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3) Badan.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen.
- b. Cabang perusahaan.
- c. Kantor perwakilan.
- d. Gedung kantor.
- e. Pabrik.
- f. Bengkel
- g. Gudang.

h. Ruang untuk promosi dan penjualan.⁸

2.1.1.11. Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk hal hal berikut ini.

- 1) Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

Dalam pengertian hadiah termasuk dari undian pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan sebagainya.

Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda benda purbakala.

⁸ Abdul Halim dkk, "*Perpajakan Edisi 2*" (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm 47.

- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, pengabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Apabila suatu badan likuidasi, keuntungan dari penjualan harta yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antar harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan,

pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha , pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak pihak yang bersangkutan.⁹

2.1.1.12. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo tata cara dari pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih

⁹ *Ibid.*, hlm 51.

realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatu oleh undang undang misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.1.13. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak menegnakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.1.14. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri- cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- A. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- B. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- C. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.15. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) ada 4 macam tariff pajak:

1. Tarif sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tariff berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tariff Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 3.000.000

3. Tarif progresif

Persentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1
Tarif Progresif

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tariff progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
- b. Tarif proresif tetap : kenaikan persentase tetap.
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.¹⁰

¹⁰ Mardiasmo “*perpajakan edisi terbaru 2016*” (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 8-12.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.¹¹

Kepatuhan dalam keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 Menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Jadi berdasarkan definisi tersebut kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban dalam mendaftarkan diri, kewajiban dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kewajiban dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan

¹¹ Rudolof A. dkk, *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung”*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, halm 298.

kewajiban dalam pembayaran tunggakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam suatu Negara.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1. Pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*

Penerapan sistem *Self Assessment* dalam perpajakan di Indonesia dimaksudkan dapat memberikan kepercayaan penuh kepada para Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini akan berjalan dengan efektif apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan Wajib Pajak memiliki pemahaman mengenai sistem tersebut, maka diharapkan Wajib Pajak dapat menerapkan mengenai apa yang dipahaminya.

2. Kualitas Pelayanan

Adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan merupakan indikator tercapainya pelayanan pajak yang baik. Dengan kondisi tersebut Kualitas pelayanan juga mempengaruhi akan perilaku Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya.

3. Tingkat Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan menyebabkan kesenjangan terhadap tingkat

pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya perbedaan tingkat pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan mengakibatkan banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan atau masih melakukan pembukuan ganda. Dengan tingkat pendidikan yang rendah juga akan mengakibatkan Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mengenai sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat Penghasilan Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak terkait erat dengan tingkat penghasilan. Penghasilan Wajib Pajak merupakan objek pajak. Tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan pemerintah untuk membuat Wajib Pajak patuh pada peraturan perpajakan. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa. Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan Wajib Pajak akan sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Selain kelima faktor tersebut menurut Putri terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

terutama dalam menyampaikan SPT, faktor tersebut antara lain adalah *e-Filing*, Pelayanan Dropbox, Sanksi, Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak.¹²

Menurut Mardiasmo Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung pajak terutang,
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.¹³

2.1.3. Kepatuhan Dalam Islam

Dalam surat Annisa ayat 59 disebutkan bahwa bagi siapa pun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi karena khianat dalam amanah menunjukan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah yang besar,

¹² Adis setyana dan Amanita Novi Yusitha, “Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan Dan Kemudahan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Fakultas Ekonomi, 2017, hlm 5-6.

¹³ Mardiasmo, “*Perpajakan Edisi Revisi 2011*” (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011), hlm 56.

dimana masyarakat harus berhati hati dan menyerahkan kepada seorang yang saleh dan layak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Annisa:59)¹⁴

Ayat ini mengatakan kepada kaum mukmin, agar taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Republik Indonesia, jadi kita warga negara Indonesia seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa Ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan wajib membayar pajak.

2.3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Menurut Jatmiko

¹⁴ Al-Qur'an Karim dan Terjemahan.

juga menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.¹⁵ Bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran merupakan kondisi wajib pajak dimana wajib pajak secara sadar penuh bahwa membayar pajak secara tepat waktu dan sukarela merupakan kewajiban wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.

¹⁵ Jatmiko, A.N. 2006. *“Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*, (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), (Online), (http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf/), diakses 16 November 2013).

2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.¹⁶

2.4. Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.4.1. Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan satu sent nomor yang terdiri dari 11 (sebelas) angka dan digit dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yang tiap kelompok mempunyai arti tersendiri.¹⁷

2.4.2. Kemanfaatan NPWP

Menurut Nengsi dan Rahayu (2016) ada 12 manfaat memiliki NPWP.

- a. Kemudahan pengurusan administrasi
- b. Pengajuan kredit bank

¹⁶ Dona Fitria, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 4 No. 1 (Sept 2017), hlm 33-34.

¹⁷ Mardiasmo, “*Perpajakan Edisi Revisi 2011*” (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011), hlm 29.

- c. Pembuatan rekening Koran di bank
- d. Pengajuan SIUP/TDP
- e. Pembayaran pajak final (pph final, PPN dan BPHTB, dll)
- f. Pembuatan paspor
- g. Mengikuti lelang di instansi pemerintah
- h. BUMN dan BUMD
- i. Kemudahan pembayaran pajak
- j. Pengambilan pajak
- k. Pengurangan pembayaran pajak
- l. Penyetoran dan pelaporan pajak¹⁸

Dengan memiliki NPWP, wajib pajak dapat memperoleh beberapa manfaat lainnya seperti sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran atau kredit pajak) atas fiscal Luar Negeri yang dibayar sewaktu pajak bertolak keluar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sebagai salah satu syarat membuat rekening Koran di bank bank.

2.4.3. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak.

¹⁸ Ningsih, Heny Triastuti Kurnia dan Sri Rahayu. 2016. *“Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksiperpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kot”*. Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN 2460-0788.

- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.4.4. Pendaftaran NPWP

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, Wajib Pajak mendaftarkan diri paling lambat paa akhir bulan berikutnya.

3. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.¹⁹

2.5. Religiusitas

Menurut Rahmawaty religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktik dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Religiusitas merupakan sikap etis wajib pajak dimana wajib pajak mempercayai adanya Tuhan. Menurut Capanna religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap jika melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa.

Dalam jurnal Ari Kristin, mengatakan bahwa religiusitas lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup

¹⁹ Mardiasmo, *“Perpajakan Edisi Revisi 2011”* (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011), hlm 29-31.

²⁰ Stella Rahmawaty. *“Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014, Vol 3, No 1.

seseorang berdasarkan nilai nilai keagamaan yang diyakini. Religiusitas dalam islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas sehari hari.²¹

Wajib pajak yang tidak etis yaitu takut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan pajak, karena wajib pajak menganggap dengan membayar pajak merupakan perilaku yang etis. Dimana wajib pajak yang memiliki perilaku etis sama saja dengan menjalankan perintah agama. Wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi, maka wajib pajak tersebut akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan.²²

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh pihak individual yang berkaitan dengan keagamaan, seberapa jauh pengetahuan tentang keagamaan yang dianut, dan berkomitmen mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam keagamaan yang dianut.

²¹ Ari Kristin P, “*Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor Dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia)*”, Volume II / Edisi 2/ Nopember 2012, Jurnal Economica, hlm 135.

²² Nanik Ermawati, Skripsi: “*Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan*” (Kudus: Universitas Muria), hlm 109.

2.6. Pajak Dalam Perspektif Islam

2.6.1. Pengertian Pajak Menurut Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut *Al-Maks*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.

Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh pemerintahan muslim kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum.

Menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.²³

Menurut Abdul Qodir pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.²⁴

²³ Muhammad Wasitho Abu Fawaz, *Hukum Pajak dalam Fiqih Islam: Bagaimana Kaum Muslimin Menyikapinya?*. [online]. Tersedia: <https://aslibumiayu.net/10410-hukum-pajak-dalam-fiqih-islam-bagaimana-kaum-muslimin-menyikapinya.html>. Diakses: 28-7-2019

²⁴ Nur Kholis, *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. [online]. Tersedia: <https://nurkholis77.staff.iii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>. Diakses: 28-7-2019

2.6.2. Jenis Pajak dalam Sistem Perpajakan Menurut Islam

a. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna mekindungi kehidupannya.²⁵ Pada masa Rasulullah Saw besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak anak, pengemis, pendeta, orangtua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. System ini terus berlangsung hingga masa harun ar-Rasyid. Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 :

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan al-kitab kepada

²⁵ Bohari, “Pengantar Hukum Pajak”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 249.

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (QS.At-Taubah:29)²⁶

b. Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah, gedung, jalan, pelabuhan, alat transportasi dan sarana sarana lain yang dikuasai negara, tetapi diperuntukkan penggunaannya kepada kalangan masyarakat tertentu.

c. Usyr

Usyr adalah bea masuk atas barang impor atau ekspor dari negara lain yang juga mengenakan beban yang sama atas barang yang masuk kesana.²⁷

2.6.3. Bagaimana Pajak Dikenakan dalam Islam

Mengenai pajak dalam Islam itu keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Perpajakan Rasul bahwa pajak sebagai instrument sosial untuk menegakkan keadilan haruslah dijalankan secara berkeadilan juga sekaligus hal itu merupakan kritik atas system perpajakan yang lazim dikenakan oleh para raja atau penguasa dimana mana yang cenderung sewenang wenang, sangat bergantung pada mood penguasa dan petugas pajak, tidak ada aturan baku yang berlaku umum dan secara keseluruhan sangat memberatkan beban wajib pajak.

²⁶ Muhammad Noor, dkk, Al-Qur'an, hlm. 152.

²⁷ Masdar Farid, "*Pajak Itu Zakat*" (Bandung, Mizan Media Utama 2005), hlm 143.

Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah Saw, selaku kepala negara atau pemerintahan mencanangkan sistem perpajakan yang di dalamnya tarif pajak, oleh pajak dan batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena pajak (nishab) ditetapkan dengan jelas, tegas, dan berlaku untuk semua warga yang tergolong sebagai wajib pajak (muzakki). Secara garis besar system perpajakan Rasulullah Saw didasarkan atas ketentuan ketentuan (syariah) yang strategis dan praktis sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan fungsi pajak sebagai instrument bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa pajak zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang telah memiliki tingkat kekayaan atau penghasilan tertentu (nishab).
- 2) Berkaitan dengan objek pajak (mal zakawi) Rasulullah Saw menetapkan bahwa pajak dikenakan atas jiwa dan harta. Pajak atas jiwa dalam bahasa agamanya disebut zakat fitrah sedangkan atas kekayaan dikenal dengan istilah zakat mal.
- 3) Sistem perpajakan harus ditentukan tariff tertentu (miqdar) yang jelas dan berlaku umum. Besar kecilnya beban pajak ditentukan oleh beban keadilan sosial dan kemaslahatan bersama yang hendak dipenuhi pada satu periode tertentu. Untuk itu maka tidak ada tarif pajak (miqdar zakah) yang dapat diberlakukan secara absolut untuk segala ruang dan zaman. Tariff pajak yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw

adalah tariff 2,5% untuk niaga (tjarah), 10% untuk per tanian (zuru), dan 20% untuk harta karun (rikaz).

- 4) Waktu pembayaran pajak Rasulullah Saw menetapkan bahwa sebagian pajak dibayar secara periodik sebagian yang lain dibayar bergantung pada kapan penghasilan yang terkena pajak itu diperoleh. Berlaku pada pajak niaga, industri, deposito (naqd), ternak dan pajak jiwa (zakat fitrah).²⁸

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian menggunakan alat analisis yang sama namun menunjukkan hasil yang beragam penelitian relevan yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2018) pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta yang terdaftar di KPP Kesadaran Wajib Pajak

²⁸ Masdar Farid, *“Pajak Itu Zakat”* (Bandung, Mizan Media Utama 2005), hlm 101-107.

berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.²⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) penelitian Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak penelitian ini menemukan Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Wahyudi (2016) penelitian Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta bahwa Penelitian ini menemukan komponen Religiusitas Interpersonal berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*) sedangkan untuk komponen

²⁹ Citra Dewi Yulianti, "*Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*", Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

³⁰ Nanik Ermawati, "*Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*", Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus, 2018.

Religiusitas Intrapersonal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masing-masing komponen religiusitas, baik religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal, tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan (*Enforced Tax Compliance*).³¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Klaten. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.”³²

³¹ Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, “ *Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak*”, Jurnal Lingkar Widyaswara, Edisi 3 No. 2, Apr – Jun 2016, hlm 11.

³² Lady Ayu Anggraeni “ *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (di Kantor Pelayanan Pajak Pratama)*”, Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

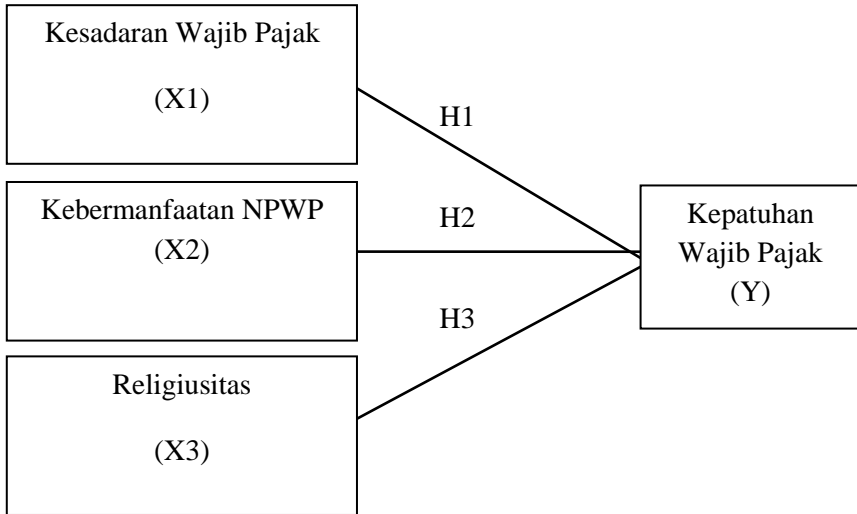
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Citra Dewi Yulianti (2018)	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Kemanfaatan npwp, pemahaman pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak sama sama berpengaruh positif dan signifikan.
2	Nanik Ermawati (2018)	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Religiusitas, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan, pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan.
3	Andhika Utama dan	Pengaruh Religiusitas	Religiusitas Dan	Kuantitatif	Variabel Religiusitas

	Dudi Wahyudi (2016)	terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta	Kepatuhan Wajib Pajak		tidak berpengaruh signifikan
4	Lady Ayu Anggraeni (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran pajak, lingkungan wajib pajak, sikap religius wajib pajak, kemanfaatan NPWP, dan kepatuhan wajib pajak.	Kuantitatif	variabel kesadaran Wajib Pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.8. Kerangka Pemikiran

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran teoritik.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritik



Sumber dari: Citra Dewi Yulianti (2018), Nanik Ermawati (2018), Andhika Utama dan Dudi Wahyudi (2016), Lady Ayu Anggraeni (2017)

Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut, maka Penelitian ini menggunakan variabel terikat (*Dependent Variable*) dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal (Y). Variabel independen (*Independent Variable*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (X1), kebermanfaatan NPWP (X2) dan religiusitas (X3).

2.9. Hipotesis Penelitian

2.9.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap wajib pajak ini yang meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu, maka pembangunan negara akan menjadi lebih berkembang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh utami, et al (2011) yang mengatakan hasil bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak tentang peran penting dari pajak, maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.2. Pengaruh Kebermanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurt Putri (2012) mengatakan wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP.³³ Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak

³³ Wike Puspasari Putri. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Yang Teraftar Di Kpp Pratama Batu)*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. 2012.

manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Berdasarkan penjabaran di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mohdali dan pope (2014) mengatakan Religiusitas dipandang sebagai bentuk berkomitmen untuk agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga komitmen ini tercermin dari sikap dan perilaku. Religiusitas menunjukkan tingkat kepatuhan individu terhadap agama. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral.³⁴ Dalam penelitian Mohdali dan Pope (2014) menunjukkan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H3 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

³⁴ Mohdali dan Pope. "The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes (empirical evidence from a mixed methods study in Malaysia)". Accounting Research Journal, 27(1). 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen yang digunakan adalah kuesioner, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³⁵

3.1.2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara

³⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm 14.

individual atau kelompok dan hasil observasi.³⁶ Data primer diperoleh dari jawaban wajib pajak yang sudah terdaftar di KPP Tegal sebagai responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner penelitian.

3.2. Populasi dan Sampel

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal yang berada di Jalan Kol. Sugiyono No. 5, Kota Tegal, Jawa Tengah. Populasi yang dipilih adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal dengan jumlah 201.650 Wajib Pajak.³⁷ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

Metode penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

³⁶ Muhammad Fauzi, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Walisongo Press, 2009, hlm 165.

³⁷ Shinung Sakti Hantoyo, dkk, “*Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)*”, Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016, hlm 4.

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1) yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 349.172 Wajib Pajak. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{204.950}{1+204.950(0,1)^2}$$

$$n = \frac{201.650}{2040,5}$$

n = 99,95 di bulatkan 100 responden³⁸

³⁸ Umi Narimawati. "Penulisan Karya Ilmiah" Bekasi : Genesis 2011.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket atau kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk menjawab dan membaca pertanyaan. Kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini adalah kuesioner secara personal yaitu kuesioner yang diberikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada responden yang berisi tentang pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan angka skala likert.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain.³⁹ Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kebermanfaatan NPWP (X2), Religiusitas (X3).

3.4.2. Variabel Dependen

Variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan

³⁹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT, Rajawali Pers, 2012, hlm. 54.

variabel independen atau bebas.⁴⁰ Variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3.5. Devinisi Operasional Variabel

pada dasarnya penentuan variabel penelitian merupakan opsioanal kontrak supaya dapat diukur. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kesadaran Wajib Pajak (XI)	kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau	1. Memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak. 2. Persepsi wajib pajak. 3. Kedisiplinan wajib pajak.	Diukur melalui skala likert

⁴⁰ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, ..., hlm. 54.

	melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber: Nasution (2006:62)	4. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Sumber: Nasution (2006:62)	
Kebermanfaatan NPWP (X2)	Manfaat NPWP adalah sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam Pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan (Ningsih dan Rahayu, 2016).	1. Sebagai tanda pengenalan diri. 2. Memudahkan pengurusan administrasi. 3. Memudahkan pelayanan pajak. (Ningsih dan Rahayu, 2016). ⁴¹	Diukur melalui skala likert

⁴¹ Ningsih, heny triastusti kurnia dan sri rahayu. 2016. "pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajakdi KPP Pratama Medan Kot .

Religiusitas (X3)	Religiusitas dimana individu berkomitmen untuk agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya. Sehinnga mempunyai komitmen ini tercermin dari sikap dan perilaku. Johnson (2001) dalam Utama dan Wahyudi (2016)	1. Keyakinan agama. 2. Praktik agama. 3. Pengalaman agama. 4. Pengetahuan agama. 5. Konsekuensi agama. (Basri,2014)	Diukur melalui skala likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua	1. .Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat	Diukur melalui skala likert

	kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya , (Nurmantu, 2003: 70).	Pemberitahuan (SPT). 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 4. Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang. Lingga dan Rahayu (2009)	
--	---	--	--

3.5.1. Instrumen Penelitian

Instrument peneliti ini menguji empat variabel yaitu kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, religiusitas dan kepatuhan wajib pajak. Variabel diukur menggunakan skala likert, yang berisi lima tingkat prefensi jawaban yaitu:

- 1) Sangat tidak setuju
- 2) Tidak setuju
- 3) Netral
- 4) Setuju
- 5) Sangat setuju

Tabel 3.2
Skala Likert

Sangat Tidak Setuju (1)	Tidak Setuju (2)	Netral (3)	Setuju (4)	Sangat Setuju (5)

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁴²

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing dalam variabel independen (bebas). Metode analisis data akan menggunakan bantuan program dari aplikasi SPSS.

3.6.2. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

⁴² Moh. Nazir “*metode penelitian*”Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, hlm 304.

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴³

3.6.3. Uji Instrumen

3.6.3.1. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.⁴⁴

3.6.3.2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.⁴⁵

3.6.4. Uji Asumsi Klasik

3.6.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

⁴³ Sugiyono, *“metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D”* Alfabeta cv, Banung, 2016, hlm 147.

⁴⁴ Imam Ghazali, *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program”* IBM SPSS 21”, Edisi 7, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro. 2013. Hlm 47.

⁴⁵ *Ibid* ., hlm 52.

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.⁴⁶

3.6.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedestisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedestisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.⁴⁷

3.6.4.3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Jika variable

⁴⁶ *Ibid* ,.hlm 160.

⁴⁷ *Ibid* ,.hlm 139.

independen saling berkorelasi, maka variable-variabel ini tidak orthogonal. Variable orthogonal adalah variable independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
2. Menganalisis korelasi diantara variabel bebas. Jika di antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (lebih besar dari 0,09%), hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai VIF (*variance inflating factor*). Jika $VIF < 10$, tingkat kolinieritas dapat ditoleransi.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid* ,.hlm 105.

3.6.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

3.6.5.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam analisis regresi linear berganda ini mempunyai variabel bebas lebih dari satu. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Perumusan model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = konstanta

β = koefisien regresi

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Kebermanfaatan NPWP

X3 = Religiusitas

e = Residual

3.6.5.2. Analisis koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara

nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁴⁹

3.6.5.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji nilai F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3.6.5.4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol.⁵⁰

⁴⁹ Imam Ghazali, “*Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21*”, Edisi 7, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro. 2013. Hlm 97.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 98.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian di KPP Pratama Tegal

Objek dari penelitian ini adalah kota Tegal yang merupakan salah satu wilayah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal memiliki luas wilayah 39,68 km². Secara administratif Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tegal di sebelah Timur, Kabupaten Tegal di sebelah selatan, dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,13 km²), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Tegal Timur (6,36).

Peningkatan pelayanan kantor pajak telah menjadi tugas ke depan. KPP Pratama Tegal merupakan bagian dari Kanwil DJP Jawa Tengah I. wilayah kerja meliputi tiga dati II yaitu, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kotamadya Tegal. KPP Pratama Tegal memiliki visi dan misi yang jelas memiliki nilai-nilai *universal* yaitu *integritas*, *teamwork*, *inovasi* dan *professional*. Kepala kantor menerapkan manajemen efektif dan cerdas dengan cara menerapkan visi, misi dan nilai-nilai Direktorat Jendral Pajak dengan

mempertimbangkan kondisi kultur masyarakat Jawa Tengah agar melahirkan kebijakan organisasi yang tepat.

Dalam penelitian ini kuesioner disebarkan kepada 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling, untuk mendiskripsikan dan menguji pengaruh variabel dependen, maka akan disajikan deskripsi data dari setiap variabel berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. Deskripsi data khusus meliputi:

4.2.Deskripsi Responden

Tabel 4.1

Deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	74	74%
Perempuan	26	26%
Total	100	100%

Sumber : data primer diolah 2019

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa jumlahresponden terdiri dari laki-laki 74 dan perempuan 26. Hal ini menandakan bahwa warga Tegal baik laki-laki atau perempuan sudah sadar hal-hal tentang pajak tanpa adanya perbedaan gender.

Tabel 4.2
Deskripsi responden berdasarkan umur

Umur	Frekuensi	Persentase
21-30 tahun	12	12%
31-40 tahun	34	33%
41-50 tahun	42	42%
Diatas 50 tahun	12	13%
Total	100	100%

Sumber : data primer diolah 2019

Dari table diatas dapat dilihat bahwa responden berusia 21-30 tahun sejumlah 12 Orang, usia 31-40 tahun berjumlah 34 orang, usia 41-50 tahun berjumlah 42 orang dan diatas usia 50 tahun berjumlah 12 orang. Diantara usia-usia diatas bahwa yang banyak dating ke kantor pajak adalah usia 41-50 tahun.

Tabel 4.3
Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA	50	50%
S1	30	30%
S2	3	3%
S3	2	2%
Lain-lain	15	15%
Total	100	100%

Dari table diatas banyaknya responden pendidikan terakhir adalah SMA sejumlah 50 responden, pendidikan SI sejumlah 30 responden, pendidikan S2 sejumlah 3 responden, pendidikan S3 sejumlah 2 responden dan sisanya tidak menyebutkan pendidikan terakhirnya sebanyak 15 responden. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden adalah SMA.

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
PNS	22	22%
Pegawai BUMN	3	3%
Karyawan Swasta	33	33%
Wirausaha	25	25%
Lainnya	17	17%
Total	100	100%

Sumber : data primer diolah 2019

Berdasarkan table diatas banyaknya responden berdasarkan pekerjaan adalah karyawan swasta dengan jumlah 33 responden.

Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Punya Atau Belum Punya NPWP

NPWP	Frekuensi	Persentase
Sudah Punya	100	100%
Belum	0	0%

Punya		
Total	100	100%

Sumber data primer diolah, 2019.

4.3. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian agar memperjelas keadaan data yang bersangkutan. Statistic deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran_wajibpajak	100	9.00	20.00	16.7200	2.23869
Kebermanfaatan_NPWP	100	9.00	20.00	15.6200	2.28646
Religiusitas	100	15.00	25.00	18.8300	2.34867
Kepatuhan_wajibpajak	100	18.00	35.00	27.4600	2.94536
Valid N (listwise)	100				

Sumber: *data primer yang diolah, (2019)*

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 100. variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai terendah sebesar 9 dan nilai tertinggi sebesar 20 dengan nilai rata-ratanya sebesar 16,720 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 2,238. Nilai variabel kebermanfaatan NPWP memiliki nilai terendah 9 dan nilai tertinggi 20 dengan nilai rata-

ratanya sebesar 15,620 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 2,286 Nilai variabel religiusitas memiliki nilai terendah 15 dan nilai tertinggi 25 dengan nilai rata ratanya sebesar 18,830 dan standar devisiasinya sebesar 2,348. Nilai variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah 18 dan nilai tertiggi 35 dengan nilai rata ratanya sebesar 27,460 dan tingkat sebaran datanya sebesar 2,945.

4.4. Uji Reliabilitas Dan Validitas

4.4.1. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika suatu variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut reliable. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada table 4.7

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Alpha Cronbach's	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,822	Reliabel
Kebermanfaatan NPWP (X2)	0,839	Reliabel
Religiusitas (X3)	0,780	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,746	Reliabel

Sumber data primer diolah, 2019.

Variabel dalam penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. tabel diatas *menunjukkan* bahwa semua variabel dikatakan reliabel terlihat dari semua nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 yang berarti jawaban yang diberikan responden sudah konsisten dalam menjawab setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel.

4.4.2. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Nilai *correlated item-total correlation* atau nilai r_{hitung} dibandingkan dengan nilai r_{tabel} . Jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka pertanyaan indikator tersebut valid.

Penelitian ini melakukan pengujian validitas pada empat variabel yaitu kesadaran wajib, kebermanfaatan NPWP, religiusitas dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kebebasan (*Degree of freedom*) dalam penelitian ini adalah $df = n - 2$. Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 100 responden, jadi besarnya $df = 100 - 2 = 98$ dengan $\alpha 0,05$ (5%) dengan uji dua sisi Maka di dapat $r_{tabel} 0,196$. Adapun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})</i>	R_{tabel}	Validitas
Kesadaran wajib pajak (X1)	KSWP_1	0,838	0,196	Valid
	KSWP_2	0,813	0,196	Valid
	KSWP_3	0,834	0,196	Valid
	KSWP_4	0,769	0,196	Valid
Kebermanfaatan NPWP (X2)	NPWP_1	0,828	0,196	Valid
	NPWP_2	0,831	0,196	Valid
	NPWP_3	0,794	0,196	Valid
	NPWP_4	0,833	0,196	Valid
Religiusitas (X3)	R_1	0,689	0,196	Valid
	R_2	0,690	0,196	Valid
	R_3	0,732	0,196	Valid
	R_4	0,748	0,196	Valid
	R_5	0,787	0,196	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	KWP_1	0,656	0,196	Valid
	KWP_2	0,599	0,196	Valid
	KWP_3	0,729	0,196	Valid
	KWP_4	0,588	0,196	Valid
	KWP_5	0,673	0,196	Valid
	KWP_6	0,563	0,196	Valid
	KWP_7	0,602	0,196	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *correlated item – total correlation* kurang dari r_{tabel} berarti bahwa pernyataan tersebut tidak mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ dan nilai positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016 : 53) yang dilihat dari table uji validitas masing masing pertanyaan lebih besar dari nilai r_{table} yaitu 0,196. Dengan demikian semua item dinyatakan valid.

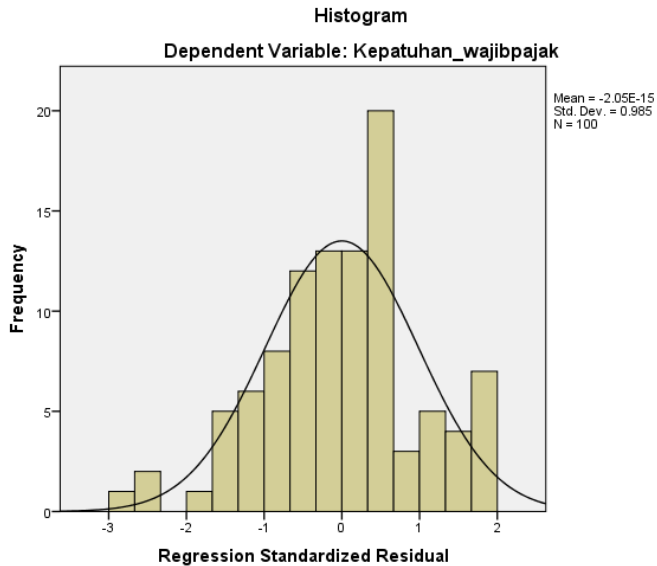
4.5. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik maka dilakukan uji normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas.

4.5.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi norma. Penelitian ini menggunakan dua macam uji normalitas yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik terdiri atas grafik histogram dan normal *probability plot*. Hasil pengolahan data menggunakan analisis grafik dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 4.1
Grafik Histogram

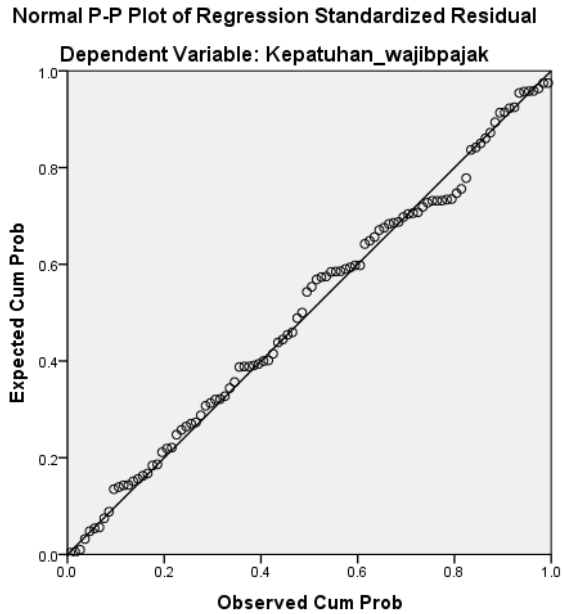


Sumber : data primer yang diolah (2019)

Pada grafik histogram terlihat bahwa variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak miring ke kiri ataupun ke kanan dan membentuk lonceng. Sehingga penyebar datanya telah berdistribusi normal.

Grafik 4.2

Normal Probability Plot



Sumber data yang diolah :2019

Berdasarkan grafik normal *probability plot* memiliki titik-titik yang mendekati garis diagonal. Dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal hal tersebut terjadi karena apabila residual dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Untuk model regresi akan diuji menggunakan analisis statistik:

Tabel 4.9
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	
	Deviation	2.04950127
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.062
	Negative	-.060
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber data yang diolah (2019)

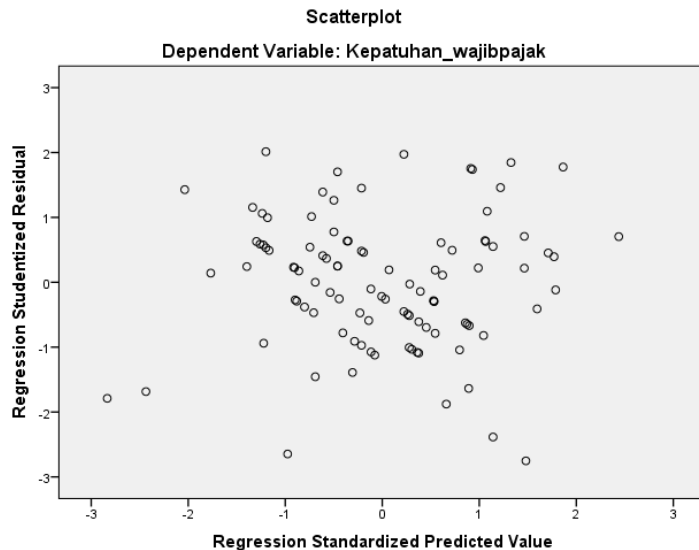
Dari table diatas diketahui bahwa nilai Kolmogorov-smirnov sebesar $0,200 > 0,05$ atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut berarti menunjukan bahwa data residual telah terdistribusi normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05.

4.5.2. Uji Heterskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Terdapat dua macam cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser. Berikut hasil pengolahan data menggunakan grafik *scatterplot*:

Grafik 4.3

Grafik Scatterplot



Sumber data primer yang diolah :2019

Gambar diatas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik

scatterplot. Dari hasil grafik diatas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas, dapat diketahui bahwa pola pada *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas sehingga dapat diartikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengolahan data menggunakan analisis statistic dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.10

Uji Glejser

Coefficients ^a						
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.885	1.366		.648	.519
	Kesadaran_wajibpajak	-.046	.061	-.084	-.758	.450
	Kebermanfaatan_NPWP	.053	.060	.098	.887	.377
	Religiusitas	.037	.054	.070	.680	.498

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber data primer diolah : 2019

Dari hasil table diatas dapat dilihat bahwa signikansi kesadaran wajib pajak yaitu $0,450 > 0,05$ untuk signifikansi kebermanfaatan NPWP yaitu $0,377 > 0,05$ dan untuk religiusitas signifikansinya $0,498 > 0,05$. Hal ini berarti variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5.3. Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan linear antara varaiabel independen di dalam regresi . Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar varaiabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan VIF dibawah 10 maka model tersebut bebas dari multikolinearitas. Hasil bisa di lihat dari table:

Tabel 4.11
Uji Multikolineritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.414	2.285		2.808	.006		

Kesadaran_							
wajibpajak	.683	.102	.519	6.667	.000	.833	1.201
Kebermanf							
ataan_NPW	.324	.100	.252	3.247	.002	.840	1.191
P							
Religiusitas	.243	.090	.193	2.686	.009	.972	1.029

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak

Sumber data primer yang diolah 2019

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Besar tolerance yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,833, kebermanfaatan NPWP sebesar 0,840, religiusitas sebesar 0,972. Sehingga nilai tersebut dapat terpenuhi karena syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai tolerance dari masing-masing variabel harus lebih dari 0,1.

Selain itu nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1,201, variabel kebermanfaatan NPWP sebesar 1,191, dan untuk variabel religiusitas sebesar 1,029. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji multikolonieritas ini bahwa nilai dari VIF harus

kurang dari 10. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas.

4.6. Uji Regresi Linear Berganda

Adapun hasil analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
Model					Sig.
1	(Constant)	6.414	2.285		2.808
	Kesadaran_wajibpajak	.683	.102	.519	6.667
	Kebermanfaatan_NPWP	.324	.100	.252	3.247
	Religiusitas	.243	.090	.193	2.686

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak

Sumber data primer yang diolah 2019

Berdasarkan table diatas maka persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 6,414 + 0,683 + 0,324 + 0,243 + 2,285$$

Keterangan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = konstanta

β = koefisien regresi

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Kebermanfaatan NPWP

X3 = Religiusitas

e = Standar error

Berdasarkan persamaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Koefisien (α) = nilai konstanta dari persamaan regresi linier berganda ini sebesar 6.414 menyatakan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas diasumsikan tidak mengalami perubahan konstan, maka kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal akan sebesar 6.414.
- b. Koefisien X1 (Kesadaran wajib pajak) Nilai dari koefisien regresi X1 yaitu sebesar 0,683 ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain, apabila kesadaran wajib pajak naik 1% maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,683 dengan asumsi variabel lain tetap.

- c. Koefisien X2 (Kebermanfaatan NPWP) Nilai dari koefisiensi regresi X2 yaitu sebesar 0,324 ini menunjukkan bahwa variabel kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain, apabila kebermanfaatan NPWP naik 1% maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,324 dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Koefisien X3 (Religiusitas) Nilai dari koefisiensi regresi X3 yaitu sebesar 0,243 ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain, apabila religiusitas naik 1% maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,243 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.7. Uji Hipotesis

Pembuktian apakah variabel kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara simultan maupun parsial. Pembuktian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas yang meliputi kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

4.7.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel – variabel dalam mempengaruhinya. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.13
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.516	.501	2.08128

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Kebermanfaatan_NPWP, Kesadaran_wajibpajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak

Sumber data primer yang diolah 2019

Berdasarkan table diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,516. Hal ini berarti bahwa 51,6% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas. Sedangkan sisanya ($100\% - 51,6\% = 48,4\%$) dijelaskan oleh sebab sebab lain diluar model.

4.7.2. Uji Signifikan Simultan (uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan religiusitas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.14

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	442.995	3	147.665	34.089	.000 ^b
	Residual	415.845	96	4.332		
	Total	858.840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, Kebermanfaatan_NPWP, Kesadaran_wajibpajak

Sumber data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji yang diperoleh nilai F-hitung sebesar 34.089 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel independen apabila tingkat signifikan $< 0,05$. maka diketahui tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

4.7.3. Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Untuk menguji apakah hipotesisi yang diajukan diterima atau ditolak digunakan statistik t (uji t). jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika tingkat signifikansi dibawah 0,5 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui T_{tabel} untuk $df = n-2$ yaitu $df = 100 - 2 = 98$ dan tingkat signifikansi (α) = 5% maka diperoleh T_{tabel} sebesar 1,984. Hasil uji persial (uji t) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.414	2.285		2.808	.006
Kesadaran_wajibpajak	.683	.102	.519	6.667	.000
Kebermanfaatan_NPWP	.324	.100	.252	3.247	.002
Religiusitas	.243	.090	.193	2.686	.009

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak

Sumber data primer diolah : 2019

- a. Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6,667. Jika dibandingkan dengan t_{table} pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,984 maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{table} ($6,667 > 1,984$). Dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dan koefisien sebesar 0,683. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang berarti berpengaruh positif dan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b. Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,247. Jika dibandingkan dengan t_{table} pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,984 maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{table} ($3,247 > 1,984$). Dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Dan koefisien sebesar 0,324. Hal ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan NPWP yang berarti berpengaruh positif dan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima.
- c. Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,686. Jika dibandingkan dengan t_{table} pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,984 maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{table} ($2,686 > 1,984$). Dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Dan koefisien sebesar 0,243. Hal ini menunjukkan

bahwa religiusitas yang berarti berpengaruh positif dan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima.

4.8. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak (X1), kebermanfaatan NPWP (X2), dan religiusitas(X3) terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.8.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,667 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan memiliki koefisien berpengaruh positif sebesar 0,683.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, melihat besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tegal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Anggraeni (2017) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu seberapa siap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dalam hal transaksi pembayaran pajak maupun pelaporan pajaknya.⁵¹

Peningkatan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Tegal ini juga tidak lepas dari peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi perpajakan, hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.8.2. Pengaruh Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua penelitian menunjukkan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap wajib pajak terhadap kebermanfaatan NPWP memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,247 sedangkan nilai t_{tabel}

⁵¹ Lady Ayu Anggraeni “ *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (di Kantor Pelayanan Pajak Pratama)*”, Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017.

sebesar 1,984, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan memiliki koefisien berpengaruh positif sebesar 0,324. Artinya variabel kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yulianti (2018) bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hasil ini menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP merupakan salah satu faktor seberapa siap dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, manfaat dari kepemilikan NPWP agar kepatuhan wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajaknya dengan tertib tanpa adanya keributan.⁵²

Maka kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tegal juga akan semakin meningkat, hal ini dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa kemanfaatan NPWP

⁵² Citra Dewi Yulianti, *“Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

merupakan kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

4.8.3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga penelitian menunjukkan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap wajib pajak terhadap religiusitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,686 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dan memiliki koefisien berpengaruh positif sebesar 0,243. Artinya variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jika wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan tingginya religiusitas seseorang maka dapat mencegah perilaku menyimpang. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi akan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan ini juga telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 29.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ernawati (2018) bahwa religiusitas berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dimana wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agamanya akan membentuk perilaku yang etis. Perilaku yang etis ini dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak dan menjalankan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memegang teguh agamanya akan berusaha mematuhi aturan agama yang dianutnya. Dan semakin tinggi tingkat iman seseorang akan membentuk perilaku yang baik perilaku yang baik ini dalam hal pembayaran pajak, maka wajib pajak di KPP Pratama Tegal akan merasa bersalah atau berdosa ketika tidak mematuhi peraturan perpajakan.⁵³

Dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan memicu perilaku positif dan mencegah perilaku negative terhadap kepatuhan perpajakan melalui keyakinan agama yang kuat sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan.

Wajib pajak yang taat akan aturan agama dan cenderung untuk selalu membayar pajak di KPP Pratama Tegal dikarenakan pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar.

⁵³ Nanik Ermawati, *“Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*, Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus, 2018.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan NPWP, Dan Religiusitas (Studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratam Tegal) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,667 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan memiliki koefisien berpengaruh positif sebesar 0,683. Hal ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak tentang peran penting dari pajak, maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan.
2. Variabel kebermanfaatan NPWP memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,247 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan memiliki koefisien berpengaruh positif sebesar 0,324. Hal ini menunjukkan variabel kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

3. religiusitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,686 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dan memiliki koefisien berpengaruh positif sebesar 0,243. Hal ini menunjukkan variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena religiusitas menunjukkan tingkat kepatuhan individu terhadap agama.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Karena terbatas waktu, sampel penelitian yang diambil pada penelitian ini sebanyak 100 responden yang diambil, sehingga kurang mampu mewakili populasi yang jumlahnya ribuan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel pengukur sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan terkait kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tegal sebagai berikut:

1. Bagi instansi pajak

KPP Pratama Tegal harus lebih memberikan informasi tentang peraturan perpajakan yang terbaru, serta lebih sering melakukan komunikasi efektif terhadap wajib pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitannya dengan kesadaran wajib pajak, kebermanfaatn NPWP, religiusitas dan kepatuhan wajib pajak serta menambah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2003. *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : AMP YKPN.
- Al-Qur'an Karim dan Terjemahan.
- Anggraeni, Lady Ayu. 2017. “ *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (di Kantor Pelayanan Pajak Pratama)*”, Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ari Kristin P. 2012. “*Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor Dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia)*”, Volume II / Edisi 2/ Nopember , Jurnal Economica.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.
- Bohari, 2004. “*Pengantar Hukum Pajak*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ermawati, Nanik, skripsi: *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus.
- Farid, Masdar. 2005. “*Pajak Itu Zakat*” Bandung, Mizan Media Utama.
- Fauzi, Muhamad. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Walisongo Press.

- Fawaz, Abu Muhammad Wasitho. 2019. “ *Hukum Pajak dalam Fiqih Islam: Bagaimana Kaum Muslimin Menyikapinya?*”. [online]. Tersedia: <https://aslibumiayu.net/10410-hukum-pajak-dalam-fiqih-islam-bagaimana-kaum-muslimin-menyikapinya.html>.Diakses.
- Fitria, Dona Fitria. 2017. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, Journal of Applied Business and Economics Vol. 4 No. 1.
- Fitria, Dona. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, Journal of Applied Business and Economics Vol. 4 No. 1.
- Ghazali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*”, Edisi 7, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Hakim, Abdul, dkk. 2017. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, Lukman. 2012. “*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*”, Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, Nurdin, dkk. 2017. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Erlangga.
- Jatmiko, 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap*

Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang.

- Kholis, Nur. *“Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia”*. 2019. [online]. Tersedia: <https://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>. Diakses.
- Kurniawati, Ftiri. 2009. *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*, Vol 5 No 1 Juni.
- Masruroh, Siti & Zulaikha. (2013). *“Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal)”*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Journal Of Accounting. Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET.
- Mohdali dan Pope. 2014. *“The influence of religiosity on taxpayers’ compliance attitudes (empirical evidence from a mixed methods study in Malaysia)”*. Accounting Research Journal, 27(1).
- Narimawati, Umi. 2011. *Penulisan Karya Ilmiah*” Bekasi : Genesis.
- Ningsih, Heny Triastuti Kurnia dan Sri Rahayu. 2016. *“Pengaruh kemanfaatanNPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksiperpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kot”*.Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN 2460-0788.

Noor, Muhammad dkk. Al-Qur'an.

Pandiangan, Liberti. 2014. *"Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia"* Erlangga.

Putri, Wike Puspasari. 2012. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu)"*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Rahman, Abdul. *"panduan pelaksanaan administrasi perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis dan perusahaan"*. Bandung: nuansa.

Rahmawaty, Stella, 2014. *Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol 3, No 1.

Rudolof A, dkk. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2).

Sekaran, Uma, 2007. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi 4 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Setyana, Adis dan Amanita Novi Yusitha. 2017. *Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan Dan Kemudahan Penggunaan E-*

Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Fakultas Ekonomi.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta.

Sukandarrumindi, 2012. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Utama, Andhika dan Dudi Wahyudi, 2016, *Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Lingkar Widwaswara, Edisi 3 No. 2, Apr – Jun.

Waluyo, 2015. *Perpajakan Indonesia Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.

Yulianti, Citra Dewi. 2018, “*Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.
Saudara / i Wajib Pajak
Di KPP Pratama Tegal

Assalamualaikum Wr.Wb
Dengan Hormat

Dalam rangka penelitian skripsi di Universitas Negeri Islam Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana strata 1. Oleh karena itu kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner tentang **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan NPWP dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal)**.

Partisipasi yang Bapak/Ibu berikan sangat penting bagi kesuksesan kami. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya saya jamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dan dalam rangka penyusunan skripsi.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini. Wasalamu'alaikum Wr.Wb.
Peneliti

Janatin Fitriyani

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
KEBERMANFAATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Tegal)
KUESIONER PENELITIAN**

A. DATA RESPONDEN

1. Nama Responden:(Boleh tidak diisi)

2. Apakah memiliki NPWP

☐

Iya

☐

Tidak

3. Jenis Kelamin

☐

Laki-laki

☐

Perempuan

4. Usia

☐

21 - 30 tahun

☐

41 - 50 tahun

☐

31 - 40 tahun

☐

> 50 tahun

5. Pekerjaan

☐

PNS

☐

Karyawan swasta

☐

Pegawai BUMN

☐

Wirausaha

☐

Lainnya.....

6. Pendidikan terakhir

☐

SMA

☐

S2

☐

D3/D4

☐

S3

☐

S1

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut Bapak/Ibu benar.
2. Cukup memberi tanda check list (√) pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu.
3. Mohon periksa kembali semua jawaban dan yakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat.

C. KUESIONER PENELITIAN

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Variabel X1 : Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
2.	Pajak ditetapkan dengan Undang-undang (UU) dan dapat dipasaksakan.					
3.	Untuk memenuhi kewajiban pajak dilakukan tepat waktu.					
4.	saya membayar pajak dengan kemauan saya sendiri tanpa pengaruh orang lain.					

Variabel X2 : Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak.					
2.	NPWP memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit bank.					
3.	NPWP memberikan kemudahan dalam pengajuan izin usaha.					
4.	NPWP memudahkan saya dalam melakukan penyetoran.					

Variabel X3 : Religiusitas

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan saya.					
2.	Saya selalu taat beribadah.					
3.	Saya sering berperilaku baik terhadap sesama manusia.					
4.	Saya yakin dan patuh terhadap pemimpin agama saya.					
5.	Saya selalu mempertimbangkan perbuatan yang					

membuat saya
berdosa dimata
Tuhan.

Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP.					
2.	Saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3.	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir.					
4.	Saya tidak pernah menunggak					

pembayaran pajak.

5. Saya membayar
kekurangan pajak
penghasilan yang ada
sebelum dilakukan
pemeriksaan.

6. Saya mencatat
pendapatan yang saya
terima dari usaha saya.

7. Saya menghitung pajak
yang terutang

dengan benar sesuai
dengan penghasilan
yang diterima.

Lampiran 2

Jawaban Responden terhadap masing masing pernyataan

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Kesadaran wajib pajak
----	------	------	------	------	--------------------------

1	4	4	4	5	17
2	4	4	5	5	18
3	4	4	4	4	16
4	5	5	5	5	20
5	5	5	5	5	20
6	4	4	4	4	16
7	4	4	4	5	17
8	4	4	4	4	16
9	5	5	4	4	18
10	4	4	5	5	18
11	4	4	3	3	14
12	5	4	4	4	17
13	3	3	3	4	13
14	4	4	4	4	16
15	4	3	4	4	15
16	5	5	4	5	19
17	5	5	5	4	19
18	5	5	4	4	18
19	5	5	4	4	18
20	4	4	5	5	18
21	4	5	5	4	18
22	4	4	5	5	18
23	5	5	4	4	18
24	4	4	4	4	16
25	5	4	5	4	18
26	4	4	4	4	16
27	5	5	5	5	20
28	4	4	4	4	16
29	4	4	4	3	15
30	4	4	4	3	15
31	5	4	5	5	19
32	4	4	5	5	18
33	4	4	5	3	16
34	5	4	4	2	15
35	4	3	3	3	13
36	3	3	3	2	11

37	4	4	3	3	14
38	4	4	3	3	14
39	5	5	4	3	17
40	4	4	4	4	16
41	5	5	5	4	19
42	4	4	4	5	17
43	4	4	4	4	16
44	5	4	5	5	19
45	5	5	5	4	19
46	5	4	5	5	19
47	4	5	5	4	18
48	5	5	5	4	19
49	5	4	5	5	19
50	4	4	4	5	17
51	4	4	4	3	15
52	5	5	4	4	18
53	5	5	4	4	18
54	4	4	4	5	17
55	4	4	5	5	18
56	2	2	3	3	10
57	4	4	4	5	17
58	4	4	4	5	17
59	5	4	5	5	19
60	4	4	4	4	16
61	3	3	4	4	14
62	3	3	4	4	14
63	4	4	5	5	18
64	4	4	3	4	15
65	4	4	4	3	15
66	4	3	4	4	15
67	5	4	5	5	19
68	4	3	4	3	14
69	5	5	5	5	20
70	4	5	5	4	18
71	4	4	4	4	16
72	4	4	4	4	16

73	4	4	4	4	16
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	5	5	5	4	19
77	5	5	5	5	20
78	5	4	4	5	18
79	5	4	4	5	18
80	4	4	4	4	16
81	5	4	5	5	19
82	4	4	4	5	17
83	4	4	4	4	16
84	3	4	4	4	15
85	4	4	4	4	16
86	4	4	5	5	18
87	2	2	3	2	9
88	3	3	3	2	11
89	4	4	4	4	16
90	5	5	5	5	20
91	4	4	4	4	16
92	4	4	5	5	18
93	5	5	4	5	19
94	5	5	5	5	20
95	4	4	4	4	16
96	5	5	5	5	20
97	4	4	4	4	16
98	3	3	3	4	13
99	4	4	4	5	17
100	4	4	3	3	14

2. Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (X2)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Kebermanfaatan NPWP
1	4	4	3	4	15

2	5	5	4	4	18
3	4	4	3	3	14
4	5	5	4	5	19
5	4	4	4	3	15
6	4	5	4	5	18
7	4	5	4	5	18
8	4	4	3	4	15
9	3	4	4	4	15
10	4	4	4	4	16
11	3	3	3	2	11
12	2	3	3	3	11
13	4	4	3	3	14
14	2	3	2	2	9
15	3	3	4	3	13
16	4	5	4	5	18
17	3	3	4	4	14
18	4	4	3	4	15
19	4	4	4	4	16
20	5	4	5	5	19
21	3	3	4	4	14
22	5	5	4	4	18
23	4	4	4	4	16
24	3	4	4	3	14
25	4	4	4	3	15
26	4	4	4	4	16
27	4	5	4	5	18
28	3	4	3	4	14
29	4	4	3	4	15
30	3	4	4	4	15
31	5	5	4	5	19

32	5	5	5	5	20
33	3	4	4	3	14
34	3	4	4	3	14
35	3	3	4	4	14
36	3	4	4	4	15
37	3	4	4	4	15
38	4	4	3	3	14
39	4	3	3	5	15
40	4	4	4	4	16
41	4	3	4	4	15
42	3	4	4	4	15
43	3	3	3	4	13
44	3	3	4	4	14
45	4	4	4	3	15
46	4	5	4	5	18
47	4	5	5	4	18
48	5	5	5	5	20
49	4	4	4	5	17
50	5	5	5	5	20
51	4	4	5	5	18
52	3	5	4	4	16
53	5	5	5	5	20
54	4	4	4	3	15
55	3	3	3	3	12
56	3	3	3	4	13
57	3	3	3	3	12
58	3	4	3	3	13
59	3	4	3	4	14
60	4	5	4	4	17
61	4	4	4	4	16

62	4	4	4	3	15
63	3	3	4	4	14
64	3	3	3	4	13
65	4	4	4	4	16
66	3	3	3	3	12
67	5	4	3	3	15
68	4	3	3	3	13
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	4	16
71	3	3	3	3	12
72	4	3	4	3	14
73	3	3	4	4	14
74	4	5	4	5	18
75	4	4	5	4	17
76	4	4	4	4	16
77	4	5	5	5	19
78	5	4	4	5	18
79	5	5	5	5	20
80	4	4	4	4	16
81	4	3	3	4	14
82	4	4	4	4	16
83	4	4	4	4	16
84	4	4	4	4	16
85	4	4	4	4	16
86	4	4	4	4	16
87	3	3	4	4	14
88	4	4	4	4	16
89	3	4	3	4	14
90	3	3	4	4	14
91	3	4	4	4	15

92	4	4	5	5	18
93	4	4	5	5	18
94	5	5	5	5	20
95	4	4	4	4	16
96	5	5	5	5	20
97	4	4	4	4	16
98	4	4	4	4	16
99	5	5	4	5	19
100	3	4	3	3	13

3. Religiusitas (X3)

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Religiusitas
1	4	3	4	3	3	17
2	3	3	4	3	3	16
3	3	4	4	4	4	19
4	3	4	4	4	4	19
5	4	4	5	5	4	22
6	3	3	3	3	3	15
7	4	3	4	4	3	18
8	3	4	3	3	4	17
9	3	4	4	4	3	18
10	5	4	4	4	4	21
11	5	5	4	4	4	22
12	4	5	4	5	5	23
13	4	4	4	4	5	21
14	4	4	3	4	4	19
15	4	3	4	2	2	15
16	4	5	4	5	4	22
17	4	4	4	4	4	20

18	3	4	3	3	3	16
19	3	3	3	3	3	15
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	3	3	18
22	4	5	4	4	5	22
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	3	3	4	18
25	4	4	4	3	3	18
26	4	5	5	4	5	23
27	4	4	4	5	5	22
28	4	4	3	4	4	19
29	4	4	3	4	3	18
30	4	4	3	3	3	17
31	4	3	3	3	4	17
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	3	19
34	4	4	4	3	3	18
35	5	5	5	3	3	21
36	4	4	4	3	3	18
37	3	4	3	3	3	16
38	3	4	4	3	3	17
39	3	5	3	3	3	17
40	3	4	3	3	3	16
41	4	4	3	3	4	18
42	3	4	3	4	3	17
43	4	4	3	3	4	18
44	4	4	3	3	3	17
45	4	4	4	3	4	19
46	3	3	4	3	4	17
47	4	4	4	4	4	20

48	4	4	4	5	5	22
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	3	3	4	4	4	18
52	4	3	4	3	4	18
53	3	4	4	3	4	18
54	3	3	3	3	3	15
55	3	3	3	4	4	17
56	4	4	4	4	4	20
57	3	3	3	3	3	15
58	3	3	4	4	4	18
59	4	3	3	4	3	17
60	4	3	4	4	3	18
61	3	4	3	4	4	18
62	4	4	3	3	3	17
63	4	5	4	4	5	22
64	3	3	4	4	3	17
65	4	4	4	4	4	20
66	3	5	5	3	4	20
67	3	4	4	4	3	18
68	4	5	5	4	5	23
69	4	4	4	5	5	22
70	3	4	3	4	4	18
71	3	3	4	4	4	18
72	4	4	4	5	5	22
73	3	4	3	4	3	17
74	3	4	4	4	2	17
75	3	3	3	4	4	17
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	4	20

78	4	5	5	4	4	22
79	3	4	4	3	3	17
80	3	3	3	3	3	15
81	3	4	4	3	4	18
82	4	4	4	4	4	20
83	3	3	3	3	3	15
84	3	4	3	3	4	17
85	4	3	3	3	3	16
86	3	4	3	3	4	17
87	3	3	4	4	4	18
88	4	3	4	4	4	19
89	3	4	3	4	3	17
90	5	4	4	4	4	21
91	4	4	4	4	4	20
92	4	3	4	4	4	19
93	4	4	5	4	5	22
94	5	5	5	5	5	25
95	5	5	5	5	5	25
96	4	4	4	4	4	20
97	5	5	5	5	5	25
98	3	4	4	3	4	18
99	4	4	4	4	5	21
100	4	4	4	4	3	19

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Kepatuhan Wajib Pajak
1	5	5	4	4	4	4	4	30
2	4	4	4	4	4	3	4	27

3	5	4	4	4	4	5	4	30
4	5	5	4	4	4	4	4	30
5	5	5	5	5	5	4	5	34
6	3	4	3	3	3	4	4	24
7	4	3	4	3	4	4	4	26
8	4	4	3	4	4	3	4	26
9	4	4	2	4	4	4	5	27
10	4	4	4	4	4	5	5	30
11	3	4	3	3	3	3	4	23
12	4	4	3	4	4	3	4	26
13	4	4	3	3	4	4	4	26
14	4	4	3	3	4	4	4	26
15	4	3	3	4	4	4	3	25
16	5	4	5	4	5	4	5	32
17	4	4	4	4	5	4	4	29
18	4	4	3	4	4	4	4	27
19	3	4	4	4	4	4	4	27
20	4	5	5	4	4	4	5	31
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	4	5	4	4	5	5	31
23	4	4	4	4	4	5	5	30
24	4	4	4	4	4	3	4	27
25	5	5	4	5	5	4	4	32
26	3	4	4	3	4	3	5	26
27	4	5	4	4	5	4	5	31
28	3	4	3	4	5	4	4	27
29	4	4	3	4	4	4	4	27
30	4	4	3	3	4	4	4	26
31	4	5	4	4	4	2	5	28
32	5	5	4	4	5	5	5	33

33	4	4	4	4	4	3	4	27
34	4	4	2	4	4	3	4	25
35	5	5	3	4	4	4	4	29
36	4	4	3	4	4	3	4	26
37	4	4	3	4	4	3	4	26
38	4	4	4	5	4	3	3	27
39	4	4	3	4	4	4	5	28
40	4	4	4	4	4	4	4	28
41	4	4	2	4	4	4	5	27
42	4	4	3	4	4	3	3	25
43	3	5	4	4	4	4	4	28
44	4	4	3	4	4	4	4	27
45	4	4	2	4	4	3	4	25
46	4	4	3	3	4	4	4	26
47	5	5	4	4	5	5	5	33
48	4	5	5	5	5	4	4	32
49	4	5	4	4	5	5	5	32
50	4	4	4	4	4	4	4	28
51	4	4	3	3	4	4	3	25
52	5	4	3	5	4	2	3	26
53	4	5	4	4	4	4	5	30
54	3	4	3	4	4	4	4	26
55	4	4	4	4	3	4	5	28
56	3	3	1	2	3	3	4	19
57	3	5	3	3	4	3	5	26
58	3	4	4	3	3	4	4	25
59	4	4	3	4	4	3	4	26
60	3	4	4	2	4	4	4	25
61	3	5	3	3	4	4	4	26
62	4	4	4	3	4	4	4	27

63	4	4	4	4	4	4	4	28
64	2	4	2	4	5	5	4	26
65	4	4	4	4	4	4	4	28
66	3	3	3	3	4	3	1	20
67	5	5	4	2	4	4	5	29
68	4	5	2	3	2	4	5	25
69	3	1	3	4	5	4	5	25
70	4	5	3	4	3	4	4	27
71	3	5	3	4	4	2	4	25
72	4	4	4	3	4	4	4	27
73	4	4	2	4	4	4	4	26
74	3	5	2	3	4	4	4	25
75	4	4	3	3	4	4	4	26
76	5	5	4	4	5	5	5	33
77	5	5	4	4	5	4	5	32
78	4	4	3	4	3	4	3	25
79	4	4	3	3	5	4	5	28
80	3	4	3	4	4	4	5	27
81	4	4	4	4	4	4	4	28
82	4	4	3	4	4	4	5	28
83	4	4	4	3	5	5	4	29
84	3	4	3	4	3	4	4	25
85	4	4	4	5	4	4	4	29
86	4	4	3	4	4	4	4	27
87	3	3	2	2	2	3	3	18
88	4	4	2	4	4	2	4	24
89	2	4	3	2	4	4	4	23
90	4	5	4	4	5	4	5	31
91	4	4	4	4	4	4	4	28
92	4	4	3	4	4	4	4	27

93	5	5	3	4	5	4	5	31
94	4	5	5	5	5	5	5	34
95	4	4	4	4	4	4	4	28
96	5	5	5	5	5	5	5	35
97	4	4	4	4	4	4	4	28
98	4	4	3	4	4	4	4	27
99	4	4	4	4	4	4	4	28
100	4	4	3	4	4	4	3	26

Lampiran 3

Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran_wajibpajak	100	9.00	20.00	16.7200	2.23869
Kebermanfaatan_NPWP	100	9.00	20.00	15.6200	2.28646
Religiusitas	100	15.00	25.00	18.8300	2.34867
Kepatuhan_wajibpajak	100	18.00	35.00	27.4600	2.94536
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 4

Deskripsi Responden

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	74	74%
Perempuan	26	26%

Total	100	100%
-------	-----	------

Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
21-30 tahun	12	12%
31-40 tahun	34	34%
41-50 tahun	42	42%
Diatas 50 tahun	12	12%
Total	100	100%

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA	50	50%
S1	30	30%
S2	3	3%

S3	2	2%
Lain-lain	15	15%
Total	100	100%

Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
PNS	22	22%
Pegawai BUMN	3	3%
Karyawan Swasta	33	33%
Wirausaha	25	25%
Lainnya	17	17%
Total	100	100%

Deskripsi Berdasarkan Punya Atau Belum Punya NPWP

NPWP	Frekuensi	Persentase
Sudah Punya	100	100%
Belum Punya	0	0%
Total	100	100%

Lampiran 5

Uji Reliabilitas Dan Uji Validitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.822	.831	4

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Kesadaran_ wajibpajak
X1.1	Pearson Correlation	1	.783**	.564**	.424**	.838**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.783**	1	.544**	.374**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100

X1.3	Pearson Correlation	.564**	.544**	1	.616**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.424**	.374**	.616**	1	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Kesadaran_wajibpajak	Pearson Correlation	.838**	.813**	.834**	.769**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized	
Cronbach's Alpha	Items	N of Items
.839	.840	4

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Kebermanfaatan_ NPWP
X2.1	Pearson Correlation	1	.655**	.509**	.547**	.828**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.655**	1	.522**	.561**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100

X2.3	Pearson Correlation	.509**	.522**	1	.609**	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.547**	.561**	.609**	1	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Kebermanfaatan_NPWP	Pearson Correlation	.828**	.831**	.794**	.833**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized	
Cronbach's Alpha	Items	N of Items
.780	.780	5

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Religiusitas
X3.1	Pearson Correlation	1	.399**	.446**	.361**	.362**	.689**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.399**	1	.416**	.319**	.413**	.690**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.446**	.416**	1	.418**	.425**	.732**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.361**	.319**	.418**	1	.594**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.362**	.413**	.425**	.594**	1	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Religiusitas	Pearson Correlation	.689**	.690**	.732**	.748**	.787**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha	
	Based on	
	Standardized	
Cronbach's Alpha	Items	N of Items
.746	.747	7

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Kepatuhan_ wajibpajak
Y.1	Pearson	1	.369**	.378**	.432**	.331**	.185	.225 ⁺	.656**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.066	.025	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson	.369**	1	.318**	.229 ⁺	.233 ⁺	.164	.382 ⁺	.599**
	Correlation								

	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.022	.020	.103	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson							.276 ⁺	
	Correlation	.378**	.318**	1	.354**	.407**	.359**	.	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000	.000	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson								
	Correlation	.432**	.229 ⁺	.354**	1	.403**	.067	.120	.588**
	Sig. (2-tailed)	.000	.022	.000		.000	.508	.236	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson								
	Correlation	.331**	.233 ⁺	.407**	.403**	1	.332**	.319 ⁺	.673**
	Sig. (2-tailed)	.001	.020	.000	.000		.001	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson								
	Correlation	.185	.164	.359**	.067	.332**	1	.358 ⁺	.563**
	Sig. (2-tailed)	.066	.103	.000	.508	.001		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson								
	Correlation	.225 ⁺	.382**	.276**	.120	.319**	.358**	1	.602**
	Sig. (2-tailed)	.025	.000	.005	.236	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan_ wajibpajak	Pearson								
	Correlation	.656**	.599**	.729**	.588**	.673**	.563**	.602 ⁺	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

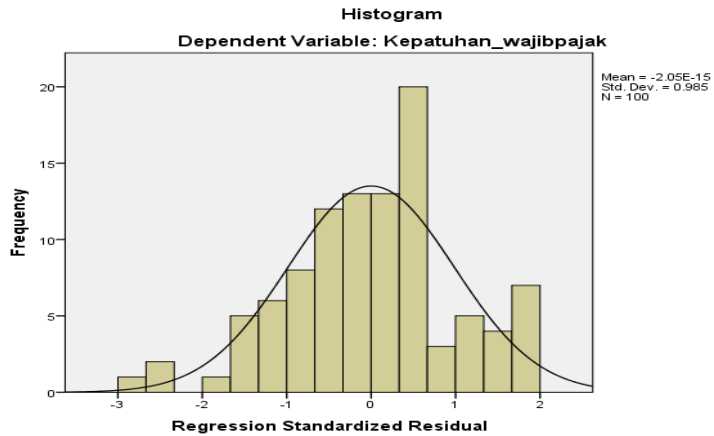
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6

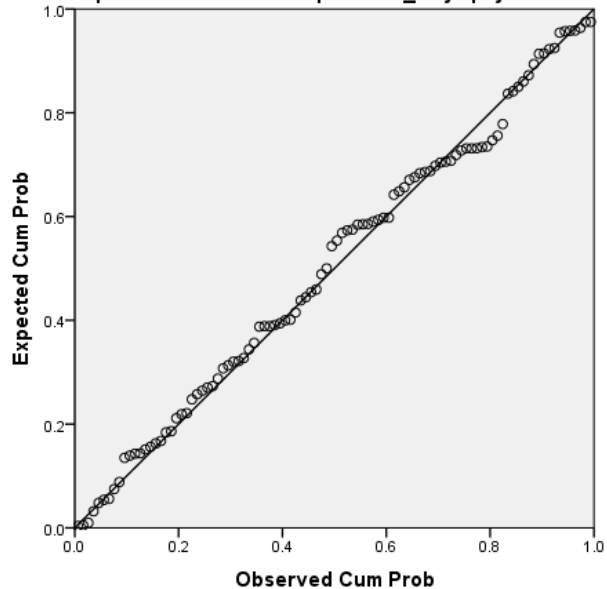
Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak



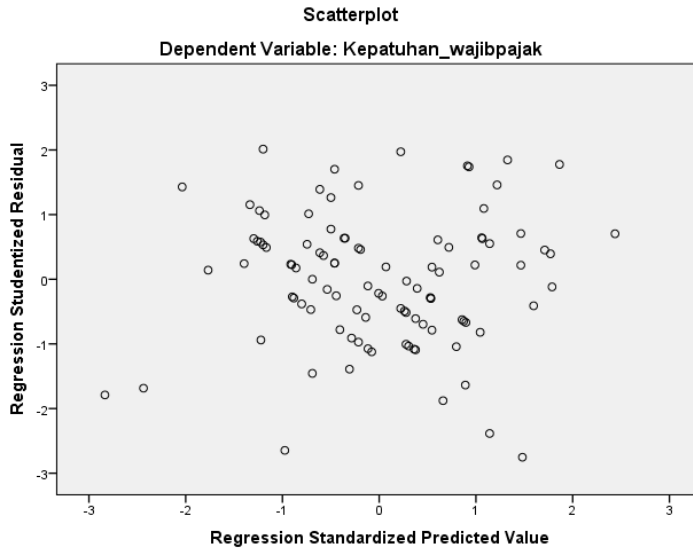
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.04950127
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.062
	Negative	-.060
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

2) Uji Heteroskedastisitas



Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
Model					t
1	(Constant)	.885	1.366		.648
	Kesadaran_wajibpajak	-.046	.061	-.084	-.758
	Kebermanfaatan_NPWP	.053	.060	.098	.887

Religiusitas	.037	.054	.070	.680	.498
--------------	------	------	------	------	------

a. Dependent Variable: ABS_RES

3) Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized		Standardized			Collinearity Statistics	
		Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1	(Constant)	6.414	2.285		2.808	.006		
	Kesadaran_wajibpajak	.683	.102	.519	6.667	.000	.833	1.201
	Kebermanfaatan_NPWP	.324	.100	.252	3.247	.002	.840	1.191
	Religiusitas	.243	.090	.193	2.686	.009	.972	1.029

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak

Lampiran 7

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	6.414	2.285		2.808
	Kesadaran_wajibpajak	.683	.102	.519	6.667
	Kebermanfaatan_NPWP	.324	.100	.252	3.247

Religiusitas	.243	.090	.193	2.686	.009
--------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak

Lampiran 8

Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.516	.501	2.08128

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Kebermanfaatan_NPWP, Kesadaran_wajibpajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak

2. Uji Signifikan Simultan (uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	442.995	3	147.665	34.089	.000 ^b
	Residual	415.845	96	4.332		
	Total	858.840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, Kebermanfaatan_NPWP, Kesadaran_wajibpajak

3. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	6.414	2.285		2.808	.006
	Kesadaran_wajibpajak	.683	.102	.519	6.667	.000
	Kebermanfaatan_NPWP	.324	.100	.252	3.247	.002
	Religiusitas	.243	.090	.193	2.686	.009

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajibpajak

Lampiran 9



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL

JALAN KOL. SUGIONO NO. 5 TEGAL 52113
TELEPON : 0283 - 353003, 356006; FAKSIMILE : 0283 - 356897; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor KET-60/WPJ.10/KP.01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Gunawan
NIP : 19701031 199503 1 001
Jabatan : Kepala Kantor
Unit Organisasi : KPP Pratama Tegal

menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Janatin Fitriyani
NPM : 1505046006
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Domisili : Desa Kupu RT/RW 04/03, Wanasari, Kab. Brebes

telah melakukan penelitian/riset dan/atau meminta bahan-bahan keterangan/data yang
dipergunakan untuk keperluan akademis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Tegal, 21 Agustus 2019
Kepala Kantor
Budi Gunawan
NIP. 19701031 199503 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Janatin Fitriyani
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 05 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kupu RT 04/03 Kecamatan
Wanasari Brebes
No HP : 085701281506
E-mail : atin.fitriyani96@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 1) MI Ikhsaniyah Kupu (2003-2009)
- 2) SMP Negeri 04 Wanasari (2009-2012)
- 3) MA Negeri 01 Brebes (2012-2015)